Wisata Petik Anggur, Destinasi Baru di Gunungkidul

GUNUNGKIDUL (KR) - Didukung potensi alam dan kondisi geografis, atraksi dan destinasi wisata di Kabupaten Gunungkidul, DIY, terus bertambah. Salah satunya wisata petik buah anggur di Kawasan Pantai Selatan Gunungkidul, tepatnya di wilayah Tanjungsari, tidak jauh dari Pantai Drini.

Lahan tegalan yang semula hanya ditanami palawija seperti jagung, kedelai, dan kacang, kini berubah menjadi kebun anggur berbagai jenis yang tumbuh subur dengan buah berwarna hijau, merah, maupun hitam.

"Semula lahan di sini oleh petani hanya ditanami palawija. Saya pikir kok sepertinya bisa untuk ditanami buah anggur. Setelah dicoba ditanam, ternyata memang dapat tumbuh subur dan menghasilkan buah yang sangat bagus. Karena itu, terus kita kembangkan. Saat ini luas kebun anggur baru sekitar

KR-M Nur Hasan

Cyrillus Harinowo dan Fabio Rusconi di Kebun Anggur Drini.

1.000 meter persegi, namun ke depan kemungkinan akan kami kembangkan hingga sekitar 1 hektare," ujar Cyrillus Harinowo, seorang ekonom dan bankir yang menginisiasi pembukaan lahan anggur di Kawasan Pansela Gunungkidul tersebut, Jumat (29/12).

Cyrillus Harinowo yang juga Komisaris BCA itu mengungkapkan, belum genap setahun, tanaman anggur yang dikembangkan di lahan terbuka maupun dengan greenhouse tersebut dapat tumbuh subur dan menghasilkan buah dengan cita rasa khas. Terdapat berbagai jenis tanaman anggur, seperti tamaki, jupiter, dengan warna buah hijau, merah, maupun hitam, baik berbiji maupun nonbiji.

"Saat ini sudah banyak wisatawan yang datang untuk menikmati wisata di kebun anggur ini. Pengunjung boleh petik dan beli langsung buah anggur dari kebun, namun sebaiknya dipetikkan oleh petugas. Sebab cara memetik anggur tidak boleh sembarangan, harus hati-hati supaya tidak merusak tanaman," kata Cyrillus Harinowo di Kafe Kebun Anggur Drini yang secara resmi dibuka kemarin.

Kafe yang berdiri di tengah-tengah lahan sawah/ladang satu kawasan dengan Drini Hills ini juga menyuguhkan Gelato Massimo hasil kolaborasi dengan Mr Fabio Rusconi dari Swiss Bagian Selatan dan perempuan pengusaha dari Bali Hari Sulistyowati.

General Manager Drini Hills Andreas Supriyadi menyampaikan, untuk masuk kebun anggur ini wisatawan tidak dikenakan biaya alias gratis. Kalau memetik atau beli buah anggurnya baru bayar. "Kami juga melibatkan warga lokal dalam mengembangkan kawasan wisata ini," kata Andreas. **(San)-d**

JUMAT CURHAT KAPOLDA DI UTDI

Ingatkan Jangan Jadi Korban Penipuan

YOGYA (KR) - Berdasar data Polda DIY kurun waktu Agustus-Oktober 2023, wilayah DIY menghadapi tantangan serius terkait maraknya kasus penipuan. Data yang telah terkumpul memberikan gambaran jelas mengenai anatomi kasus penipuan yang perlu menjadi perhatian bersama.

Hal ini disampaikan Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan saat 'Jumat Curhat' bersama mahasiswa dan keluarga besar Universitas Teknologi Digital Indonesia (UTDI) di kampus setempat, Jumat (29/12).

"Kami menyadari, polisi bukan siapa-siapa tanpa dukungan dan peran serta masyarakat. Mari kita bersama-sama meningkatkan kewaspadaan dan ketelitian supaya tidak terjadi korban-korban penipuan selanjutnya," kata Suwondo.

Selain menyampaikan tips agar tidak menjadi korban penipuan, Suwondo juga menerima sejumlah cerita maupun masukan dari para mahasiswa. Mulai dari curhat mahasiswa yang akan ditilang polisi gara-gara tak berhelm, hingga pertanyaan penanganan kasus kejahatan jalanan yang pernah viral di DIY.

KR-Surya Adi Lesmana

Kapolda DIY bersama mahasiswa dan sivitas akademika UTDI.

Sementara Ir Teguh Wijono Budi Prasetijo MM mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Kapolda DIY memilih UTDI sebagai tempat pelaksanaan acara Jumat Curhat Kapolda DIY. "Kegiatan ini akan lebih mempererat sinergi antara Polda DIY dan UTDI yang telah terjalin dalam menciptakan generasi muda yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan masa depan," kata Teguh.

Rektor UTDI Sri Redjeki SSi MKom PhD menambahkan, atensi dari Kapolda DIY kepada para mahasiswanya pada Jumat Curhat ini dinilainya luar biasa. **(Sal)-d**

Sultan: ..... Sambungan hal 1

nakan OPD di kabupaten/kota, untuk Kota Yogyakarta sebesar Rp 84,8 miliar, Kabupaten Bantul Rp 53,15 miliar, Kabupaten Kulonprogo Rp 83,5 miliar, Kabupaten Gunungkidul Rp 60,3 miliar dan Kabupaten Sleman Rp 44,5 miliar.

Dana keistimewaan untuk percepatan pencapaian program strategis Gubernur DIY dan pemberdayaan masyarakat di kalurahan sebesar Rp 131,4 miliar. Sedangkan bentuk BKK Dana Keistimewaan yang diberikan pada kalurahan antara lain Balai Budaya (tiga kalurahan) Rp 4,14 miliar, Desa/Kalurahan Maritim (lima kalurahan) Rp 3,75 miliar, Desa/Kalurahan Mandiri Budaya (24 kalurahan) Rp 26,7 miliar, Desa/Kalurahan Budaya (tujuh kalurahan) Rp 3,3 miliar, Desa/Kalurahan Wisata (11 kalurahan) Rp 7,9 miliar, Desa/Kalurahan Preneur (tujuh kalurahan) Rp 3,56 miliar, Desa/Kalurahan Prima (tujuh kalurahan) Rp 1,75 miliar, Desa/Kalurahan Mandiri Pangan (empat kalurahan) Rp 3 miliar, WBTB (satu kalurahan) Rp 2 miliar.

Padat Karya Jogja Istimewa (160 kalurahan) Rp 29,4 miliar, Desa Penerapan Administrasi Tanah Desa (12 kalurahan) Rp 3,9 miliar, Kawasan Terpadu (sembilan kalurahan) Rp 17,9 miliar, Omah Jaga Warga (41 kalurahan) Rp 2,05 miliar, BKK Arsitektur Gaya Yogyakarta (RTLH) 82 kalurahan Rp 20,15 miliar, Demplot Jogja Hijau (tiga kalurahan) Rp 1,5 miliar, BKK Kampung Berkah (dua kalurahan) Rp 400 juta, BKK Arsitektur Gaya Yogyakarta (RTLH) Perkotaan (sembilan unit) Rp 585 juta.

Menurut Benny, perolehan di setiap kalurahan/kelurahan tidak semuanya sama sesuai dengan potensi, dan kesiapan pelaksanaan kegiatan. Kalurahan mengelola dana keistimewaan dari Rp 50 juta sampai dengan terbesar Rp 6,25 miliar tidak merata, sesuai potensi dan pengalaman dalam pengelolaan dana keistimewaan.

"Kalurahan yang diundang di sini untuk menerima secara simbolis BKK Dana Keistimewaan 2024 sebanyak 19 kalurahan, dan terdapat 18 Kalurahan Mandiri Budaya yang berpartisipasi dalam pameran hasil pembinaan BKK Desa/Kalurahan Mandiri Budaya dan Kalurahan Mandiri Pangan," kata Benny pula. **(Wan)**

Pendidikan ..... Sambungan hal 1

Hal ini dilakukan sebagai upaya Indonesia dalam memastikan keterlibatan kaum perempuan dalam proses yang transformatif menuju perdamaian yang berkelanjutan. Menlu percaya, dengan berinvestasi kepada kaum perempuan adalah berinvestasi kepada masa depan yang lebih cerah.

"Ini akan selalu menjadi komitmen Indonesia, dalam berkontribusi dan memastikan terwujudnya pendidikan yang adil dan menyeluruh. Seluruh mahasiswa yang hadir di sini saya harap dapat menjadi agen pendidikan yang akan menyebarkan pengetahuan kepada lingkungan dan sesama di negara anda masing-masing," pesannya.

Wakil Rektor UMY Bidang Kerjasama dan Internasional Prof Dr Achmad Nurmandi MSc mengatakan, apa yang diupayakan pemerintah Indonesia menjadi bagian dari program Muhammadiyah yang berusaha menerapkan konsep *rahmatan lil 'alamin* dalam sektor pendidikan. **(Fsy)-f**

KPK ..... Sambungan hal 1

bisa segera menangkap Harun Masiku. Wahyu mengatakan demikian, karena menjadi tidak adil jika dia telah menjalani hukuman, tetapi KPK tidak berhasil menangkap Harun Masiku. "Saya sudah menjalani tanggung jawab saya. Kalau kemudian Harun Masiku tidak ditangkap, saya juga mempertanyakan hukum yang berkeadilan. Itu prinsip bagi saya," tuturnya.

Seperti diketahui, Wahyu Setiawan bebas bersyarat pada tanggal 6 Oktober 2023 setelah menjalani hukuman sebagai terpidana penerima suap kasus korupsi pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 yang melibatkan Harun Masiku. Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di KPU RI. Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020. **(Ful)-f**

UGM ..... Sambungan hal 1

di lingkungan Perguruan Tinggi dan Permendikbudristek Nomor 46 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam Satuan Pendidikan di Indonesia. UGM telah memiliki kebijakan-kebijakan internal nirkekerasan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan UGM yang diperbaharui dalam Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual oleh Masyarakat UGM.

Sebelumnya, dalam SE Dekan Fakultas Teknik Nomor 2480112/UN1/FTK/I/KM/2023 yang diunggah di laman resmi FT UGM disebutkan bahwa Fakultas Teknik UGM menolak dan melarang aktivitas dan penyebarluasan LGBT bagi seluruh Masyarakat Fakultas Teknik UGM karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan norma yang berlaku di Indonesia. Dalam SE itu disebutkan pula bahwa FT UGM bisa memberikan sanksi hingga maksimal terhadap dosen, mahasiswa, maupun tenaga kependidikan yang terbukti memiliki perilaku dan atau melakukan penyebarluasan paham, pemikiran, sikap, dan perilaku yang mendukung LGBT. **(Ant/Has)-f**

Presiden ..... Sambungan hal 1

Ketiga adalah Pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK bahwa pemberhentian pimpinan KPK ditetapkan melalui keputusan presiden," ungkap Ari.

Sementara itu, Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) akan menggugat Keppres tentang Pemberhentian Firli Bahuri ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila Keppres tersebut tidak menyebutkan pemberhentian tidak dengan hormat. Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan Keppres yang secara tegas memberhentikan Firli Bahuri dengan tidak hormat dari jabatan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat diperlukan. "Sampai sekarang kan kita belum tahu, hanya diberhentikan. Kalau hanya begitu maka saya akan mengajukan gugatan melawan Presiden untuk tidak sahnya keputusan presiden memberhentikan Pak Firli," kata Boyamin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (29/12).

Untuk itu, Boyamin meminta Kementerian Sekretariat Negara segera memublikasikan isi Keppres Pemberhentian Firli Bahuri. "Saya meminta kepada Sekretariat Negara segera memublikasikan suratnya. Kalau itu sudah diberhentikan tidak dengan hormat, ya sudah, saya cukup. Tapi, kalau belum, baru persiapan mengajukan gugatan PTUN," imbuhnya. **(Ant/Has)-f**

19 Kawasan ..... Sambungan hal 1

Menurut Andi, sejumlah tempat yang masuk kawasan rawan narkotika oleh BNNP DIY akan diintervensi. Petugas BNNP DIY terlebih dahulu akan melihat potensi ekonomi pada suatu kawasan rawan narkotika tersebut. Setelah itu akan dilakukan pendampingan berupa pelatihan keterampilan kepada warga yang berada di kawasan rawan narkotika. Masyarakat di kawasan tersebut akan dilatih membuat aneka kuliner, dicarikan pasarnya, atau diberikan bantuan alat agar lepas dari pengaruh buruk narkotika.

"Salah satu yang sudah kita lakukan ada di Kepek, Saptosari, Gunungkidul. Masyarakat di sana butuh pengolahan tahu. Kita bantu dan kasih bahan serta diberikan arahan untuk dijual ke mana, sehingga bebas dari pengaruh narkoba," ungkapnya.

Andi menambahkan, adanya 19 kawasan rawan narkotika di DIY harus menjadi kekhawatiran dan perhatian semua pihak. Apalagi meski kebanyakan ada di Kabupaten Sleman, tapi kawasan rawan narkotika itu ada di setiap kabupaten/kota di DIY. Kabupaten Sleman mendominasi karena di wilayah tersebut banyak tempat pendidikan, sarana hiburan dan kantong ekonomi sehingga rawan terhadap peredaran narkoba.

Sedangkan untuk mengoptimalkan Program IBM, pihaknya melibatkan tokoh masyarakat di wilayah rawan peredaran narkoba agar terlibat dalam penanggulangan. "Kami melibatkan tokoh masyarakat bukan tanpa alasan, karena banyak pecandu narkoba cenderung takut untuk mengakses layanan rehabilitasi. Karena ada anggapan klien rehabilitasi akan dijerat dengan status hukum," paparnya. **(Ria)-d**

Demokrasi ..... Sambungan hal 1

Sebelumnya, perubahan UU MK yang berlangsung kilat, tanpa partisipasi bermakna (*meaningful participation*) merupakan bentuk intervensi cabang kekuasaan lain atas MK. Kasus Hakim MK Aswanto yang diberhentikan DPR RI, karena membatalkan UU inisiatif DPR merupakan pendahuluan atas intervensi eksternal tersebut, sekaligus menegaskan masalah serius di MK. Lembaga yudikatif yang sejak awal didesain untuk menjadi *special tribunal* karena rendahnya kepercayaan publik atas lembaga peradilan di bawah MA itu kini menuai ketidakpercayaan publik pula.

Kredibilitas MK yang merosot tajam juga terjadi pada KPK. Independensi KPK telah luluh lantak melalui Revisi UU KPK, terutama dengan rusaknya tata kelola penegakan hukum atas perkara-perkara korupsi yang selama ini menjadi mahkota KPK. Juga melalui tata kepegawaian KPK yang kini diakuisisi cabang kekuasaan eksekutif. Ketidakpercayaan terhadap KPK makin membuncah dengan ditetapkannya Ketua KPK yang baru saja diperpanjang masa jabatannya oleh Presiden, yaitu Firli Bahuri, sebagai tersangka kasus pemerasan dalam kasus korupsi bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Beberapa fenomena yang penulis nukil tersebut menegaskan bahwa kita semakin menjauh dari cita gerakan Reformasi 1998. Sebagaimana diketahui bersama, salah satu tujuan utama gerakan Reformasi 1998 adalah untuk mewujudkan negara hukum (*rechtsstaat*) yang demokratis. Cita tersebut merupakan koreksi atas karakter negara kekuasaan (*machstaat*) yang dipraktikkan oleh rezim Orde Baru melalui tata kelola pemerintahan secara represif dan otoriter.

Setelah seperempat abad Reformasi 1998, kondisi demokrasi kita semakin banyak disoal. Penyimpangan dalam bidang hukum ini tersebut beriringan dengan praktik politik yang semakin tidak demokratis. Demokrasi kita semakin prosedural, dan tidak substantif. Lebih serius lagi, demokrasi Indonesia menjauh dari konsolidasi, dan bahkan menunjukkan watak berbalik ke arah anti demokrasi, *the antidemocratic turn*, sebagaimana diulas oleh Freedom House (2021).

Kajian komprehensif yang dilakukan ISEAS dan dipublikasikan dalam Bunga Rampai berjudul *Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression?* (2020) yang diedit oleh Thomas Power dan Eve Warburton menunjukkan bahwa telah terjadi kemandegan demokrasi di Indonesia dan bahkan menampilkan secara kentara gejala-gejala kemunduran. Penulis melihat bahwa demokrasi kita mengarah pada otoritarianisme. Penanda utamanya adalah semakin rendahnya kualitas kebebasan sipil dan politik, khususnya kebebasan berekspresi atau hak untuk mengemukakan pendapat di muka umum serta tidak bekerjanya fungsi kontrol antarkelembagaan (*checks and balances*) dan kontrol rakyat (*popular control*).

Dalam konteks itu, Pemilu 2024 mendatang mesti ditempatkan sebagai momentum untuk melakukan lompatan besar. Elite selalu punya caranya sendiri untuk merekayasa pemilu bagi kepentingan ekonomi-politik mereka. Namun dalam pemilu, rakyat harus menunjukkan kekuatan inti demokrasi bahwa rakyatlah pemilik kedaulatan rakyat. Pemilu selalu menyajikan ruang bagi akhir dan awal sebuah rezim politik.

(*Penulis adalah akademisi politik di Fishipol UNY dan Direktur Eksekutif Setara Institute for Democracy and Peace*)-d

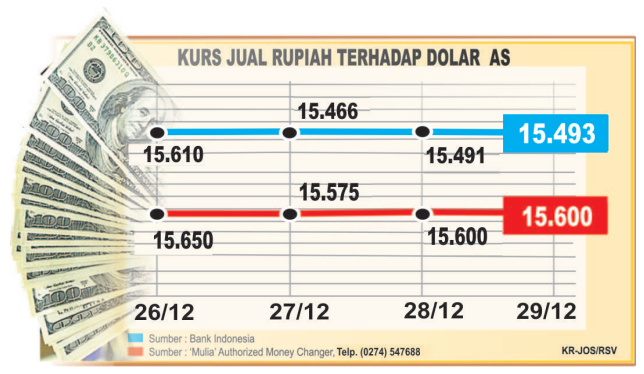

Prakiraan Cuaca Sabtu, 30 Desember 2023

Lokasi	Cuaca: Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu °C	Kelembaban
Bantul					22-30	65-95
Sleman					22-29	65-95
Wates					22-29	65-95
Wonosari					22-30	65-95
Yogyakarta					22-30	65-95

Cerah, Berawan, Udara Kabur, Hujan Lokal, Hujan Petir

Grafis : Arko

Tumpukan Sampah Membuat Resah

Vidyana Arsanti, S.Si., M.Sc.
Dosen Prodi Geografi
Universitas Amikom Yogyakarta

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
Creative Economy Park

PERMASALAHAN sampah masih bergulir di kalangan masyarakat, kegelisahan dan kekhawatiran masyarakat akan di tutupnya TPA Piyungan secara permanen terutama jika wilayah tersebut belum mandiri dalam mengelola sampah. Penutupan TPA Piyungan bisa menimbulkan berbagai masalah, seperti pencemaran lingkungan, penumpukan sampah di tempat-tempat yang tidak semestinya, dan ancaman terhadap kesehatan masyarakat. Memahami bahwa tumpukan sampah dapat menjadi sumber ketidaknyamanan dan keresahan bagi lingkungan sekitar, maka perlu solusi yang lebih nyata. Perlunya partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing. Musyawarah bersama tentang dampak penutupan TPA Piyungan bagi wilayahnya dan mencari solusi bersama untuk mengelola sampah secara efisien yang memungkinkan untuk dilakukan secara bersama-sama. Masyarakat yang belum paham akan pengelolaan sampah di edukasi melalui pertemuan-pertemuan warga seperti pertemuan Dasawisma, pertemuan RT, dan pertemuan RW. Lakukan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Informasikan mengenai dampak buruk dari penutupan TPA dan informasikan rencana solusi yang akan dilakukan secara bersama-sama. Tindakan secara bersama disini mengusung konsep pengelolaan sampah secara terpadu yang melibatkan seluruh masyarakat, "Dari Masyarakat, Oleh Masyarakat, dan Untuk Masyarakat". Menggalakkan sistem pengelolaan sampah terpadu yang melibatkan partisipasi masyarakat, dengan menggandeng pemerintah setempat dan sektor swasta yang ada di wilayah tersebut maka akan lebih mudah mencari solusi yang berkelanjutan.

Program Daur Ulang sampah secara tertib, dorong program daur ulang agar sampah dapat dimanfaatkan kembali dan tidak hanya menjadi beban lingkungan, hal ini dapat membantu mengurangi volume sampah yang harus dibuang. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga juga harus digalakkan secara disiplin, masyarakat harus mau memisahkan sampah organik dan non-organik di rumah tangga masing-masing, hal ini akan mempermudah proses pengelolaan sampah secara keseluruhan. Selanjutnya kolaborasi dengan pihak pelapak, pengepul sampah organik maupun sampah anorganik dan juga Bank Sampah. Jalin kerjasama juga dengan LSM bidang lingkungan, lembaga pendidikan, dan perusahaan swasta yang memiliki keahlian dalam pengelolaan sampah. Pihak-pihak ini dapat diminta untuk memberikan bantuan teknis dan sumber daya seperti pelatihan pengelolaan sampah, pembuatan alat pengelolaan sampah, dan lain sebagainya. Peran Pemerintah setempat juga diperlukan dalam kegiatan pengelolaan sampah terpadu ini. Tekankan kepada pemerintah daerah untuk memberikan dukungan dan regulasi yang mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Anggaran dan kebijakan yang tepat dapat mempercepat perubahan positif. Diskusikan kepada pemerintah setempat rencana tanggap darurat yang mungkin terjadi yang juga harus disiapkan untuk menangani situasi segera setelah penutupan TPA, termasuk pemindahan sementara sampah ke tempat yang aman.

Berikut beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah tumpukan sampah, pertama dengan pengelolaan sampah yang baik. Pertama, harus dipastikan terdapat sistem pengelolaan sampah yang baik dan efisien di wilayah masing-masing, dalam pengelolaan sampah yang baik ini dimulai dari pengumpulan sampah, pemilahan jenis sampah, dan juga daur ulang sampah, yang terakhir adalah pengelolaan sampah residu dengan benar. Kedua, yaitu adanya program daur ulang, disini tidak harus dilakukan secara mandiri oleh tiap wilayah namun dapat bekerjasama dengan pihak lain untuk mendorong program daur ulang di wilayah. Ketiga, yang terpenting yaitu upaya pengurangan sampah sekali pakai, dengan cara mengganti dengan barang-barang yang dapat digunakan berulang kali atau yang dapat didaur ulang contohnya penggunaan kantong plastik sekali pakai dapat diganti dengan penggunaan tas belanja yang dapat digunakan berulang kali. Keempat, jangan pernah bosan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan mengkampanyekan pengelolaan sampah kepada masyarakat dan tentang cara-cara mengelola sampah yang baik. Berikan gambaran secara nyata tentang dampak buruk tumpukan sampah. Hal ini dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih bertanggung jawab. Ajaklah masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan sampah, seperti menjaga kebersihan lingkungan atau program kerja bakti. Kelima, penegakan aturan dan sangsi hukum bagi pelanggarannya. Keenam, inovasi teknologi seperti penggunaan teknologi modern dalam pengelolaan sampah, seperti penggunaan alat pencacah sampah, alat pemilah sampah dan alat pembakar sampah. Melalui enam langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi keresahan masyarakat akibat tumpukan sampah dan sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan. Salam 3R.